



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 - i) Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas dapat melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

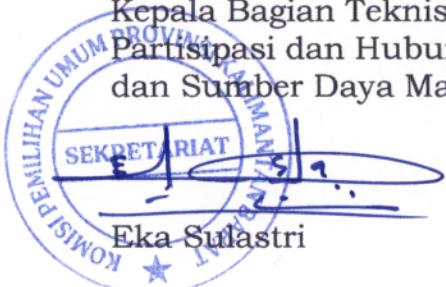
Ditetapkan di Pontianak
pada Tanggal 22 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2024

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I PENGARAH				
1	Muhammad Syarifuddin Budi, S.T.	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusuna kegiatan Reformasi Birokrasi; - Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan;
2	Heru Hermansyah, S.H.	Anggota	Pengarah merangkap Ketua	
3	Syarifah Nuraini, S.Pd.I., M.Pd.	Anggota	Pengarah merangkap Ketua	
4	Kartono Nuryadi, S.Si.	Anggota	Pengarah merangkap Ketua	
5	Suryadi, S.Pd.	Anggota	Pengarah merangkap Ketua	
II PELAKSANA				
1	Dra. Krisnawaty Kristina Banjarnahor, AP., MM.	Plt. Sekretaris	Ketua	Ketua
A TIM MANAJEMEN PERUBAHAN/BUDAYA KERJA APARATUR				
1	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat; - Melaksanakan sosialisasi dan
2	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,	Asesor	

		Hukum dan Sumber Daya Manusia		internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;
3	Dra. Asriliyanti, MM.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota	
4	Leni Marlina, S.Hut., MM.	Kasubbag Perencanaan	Anggota	
5	Nuri Mursriwati, SE.	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota	
6	Nuraini, SE.	Kasubbag Keuangan	Anggota	
7	Widya Pramithasari, SE.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota	
8	Ika Kartika, SE., M.I.Pol.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
9	Yulisinta Sinaga, SH.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
10	Faisal Abdul Halid, SH., MH.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
11	Zulfikar, SE.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Anggota	
12	Yulianingsih, SE.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota	
B	TIM DEREGLASI KEBIJAKAN			
1	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat; - Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3	Faisal Abdul Halid, SH., MH.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
4	Yulisinta Sinaga, SH.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
5	Iswatul Hasanah, SH.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
6	Tropi Yani, S.Ak.	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota	
C	TIM KELEMBAGAAN/PENGUATAN ORGANISASI			
1	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu
2	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,	Asesor	

		Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia		mendukung tercapainya tujuan sasaran reformasi birokrasi;
3	Leni Marlina, S.Hut., MM.	Kasubbag Perencanaan	Anggota	
4	R. Seno Suharyo, SH.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
5	Irma Dewi Jatmianingsih, SE.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota	
6	Rika Kastiani, ST.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	
D	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>;
2	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3	Leni Marlina, S.Hut., MM.	Kasubbag Perencanaan	Anggota	
4	Nuri Mursriwati, SE.	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota	
5	Ika Kartika, SE., M.I.Pol.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
6	Widya Pramithasari, SE.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota	
7	R. Seno Suharyo, SH.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
8	Ashari, S.IP.	Analisis Data dan Informasi	Anggota	
9	Nanang Prayoga, SH.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	
10	Asep Maulana, S.Sos.	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota	
E	TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR			
1	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,	Koordinator	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka,

		Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia		transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;
2	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
3	Yulisinta Sinaga, SH.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
4	Tarsinah, SH.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	- Melaksanakan sistem dan proses pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik;
5	Gabe Ferdinal Hutagalung, SH.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
F	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting;
3	Dra. Asriliyanti, MM.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota	
4	Faisal Abdul Halid, SH., MH.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
5	Yulisinta Sinaga, SH.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
6	Iswatul Hasanah, SH.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
G	TIM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
2	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat;

3	Nuraini, SE.	Kasubbag Keuangan	Anggota	
4	Leni Marlina, S.Hut., MM.	Kasubbag Perencanaan	Anggota	
5	Widya Pramithasari, SE.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota	
6	Irma Dewi Jatmianingsih, SE.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota	
7	Regina Angela Dian Novianti, SE.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota	
8	Elisa Dina Prayekti, SE.	Penyusun Laporan Akuntabilitas	Anggota	
9	Rika Kastiani, SE.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	
10	Ria Fitriani, A.Md.	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota	
11	Rosinta M. Pardede, SE.	Penyusun Laporan keuangan	Anggota	
12	Risa Audina, A.Md.	Pengadministrasi Umum	Anggota	
13	Rianisa Kirana, A.Md.	Pengadministrasi Umum	Anggota	
H	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3	Ika Kartika, SE., M.I.Pol.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
4	Widya Pramithasari, SE.	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota	
5	Fachziar, S.Kom.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	
6	Shofiy Nurlatief Siti Afifah, ST.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota	
7	Nanang Prayoga, SH.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	
8	Regina Angela Dian Novianti, SE.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota	

9	Asep Maulana, S.Sos.	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota	
III	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Agen Perubahan pada Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Agen Perubahan pada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;
3	Dra. Asriliyanti, MM.	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Agen Perubahan pada Fungsional Penata Kelola Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan reformasi
4	Leni Marlina, S.Hut., MM.	Kasubbag Perencanaan	Agen Perubahan pada Sub Bagian Perencanaan	
5	Nuri Mursriwati, SE.	Kasubbag Data dan Informasi	Agen Perubahan pada Sub Bagian Data dan Informasi	
6	Nuraini, SE.	Kasubbag Keuangan	Agen Perubahan pada Sub Bagian Keuangan	
7	Widya Pramithasari, SE.	Kasubbag Umum dan Logistik	Agen Perubahan pada Sub Bagian Umum dan Logistik	
8	Ika Kartika, SE., M.I.Pol.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	

9	Yulisinta Sinaga, SH.	Kasubbag Hukum dan SDM	Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum dan SDM	
10	Faisal Abdul Halid, SH., MH.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Agen Perubahan pada Fungsional Penata Kelola Pemilu	
11	Zulfikar, SE.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Agen Perubahan pada Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	
12	Yulianingsih, SE.	Arsiparis Ahli Muda	Agen Perubahan pada Fungsional Arsiparis	

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,

